

**EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**



Skripsi Oleh :

**BOBBY ALLAY INDO ANGGARISTA
NIM 01061003052**

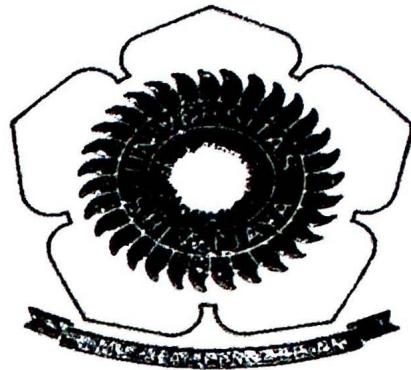
**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2010**

S.
658.154 07

Bob
e
2011

**EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**



Skripsi Oleh :

**BOBBY ALLAY INDO ANGGARISTA
NIM 01061003052**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

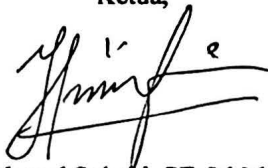
NAMA : BOBBY ALLAY INDO ANGGARISTA
NIM : 01061003052
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : **EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 9 mei 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia ujian komprehensif

Inderalaya, 9 mei 2011

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak
NIP. 19650816 199512 1001

Anggota,



H. Aspahani, SE, M.M, Ak
NIP. 19660704 199203 1004

Anggota



Sulaiman S M, SE, M.B.A, Ak.,
NIP. 19630120 199203 1002

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP. 19580828 198810 1001

MOTTO DAN PERSEMAHAN

Motto :

"Problem can always be solved by change. The options are changing the problems or changing your perspective"

"In life, there will always be someone trying to bring you down. Have faith, pray, stay strong, and focus"

"Dan tiada bagimu selain Allah SWT seorang pelindung maupun seorang penolong (Al-Baqarah 107)"

Persembahan :

- ❖ Untuk kedua orang tuaku yang dengan kasih sayang dan ridhonya selalu mendukungku....
- ❖ Kakak-kakak dan adikku yang selalu mendukung dan menyemangati....
- ❖ Sahabat-sahabatku yang selalu ada disaatku menghadapi kesulitan....
- ❖ Almamaterku...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya juaiah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung**. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum Kota Bandar Lampung, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja tetapi belum utuh dikarenakan adanya beberapa hal yang belum dipenuhi.

. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait serta bagi para peneliti selanjutnya. Akhir kata dengan segala ketulusan, penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis

Bobby A.I.A

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhannuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik.
4. Ahmad Subeki, SE, M.M., Ak, Ketua Pembimbing Skripsi.
5. H. Aspahani, SE, M.M. Ak, Anggota Pembimbing Skripsi
6. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa – doa terbaiknya dan dukungannya baik moral maupun finansial.
9. Kakak – kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat untuk terus maju.
10. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun finansial.
11. Indah Wien Utami atas segala bentuk doa, semangat dan dukungannya.
12. Sahabat-sahabatku Nurwanto, Bowo, Acep, Mirza, Gumul, Ajik, Mail, Cakra, Redo, Hilman, Jasman terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungan yang telah diberikan.

13. Teman-temanku Selvi, Dea, Ela, Onik, Wulan, Yeyen, Ira, Nina, Nana, Vivi, Angling, Iren, Wati, Dian, Tari dan teman-teman seangkatan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis

Bobby A.I.A

DAFTAR ISI

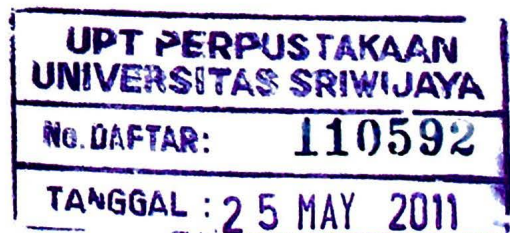
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAKSI	xiii
ABSTRACT	xiv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metodologi Penelitian	5
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.5.2. Lokasi Penelitian	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4. Jenis Data	6
1.5.5. Teknik Analisis Data	7
1.6. Sistematika Penulisan	8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian dan Karakteristik Anggaran	10
2.2. Konsep Anggaran Sektor Publik	11
2.2.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik	11
2.2.2. Fungsi Anggaran Sektor Publik	11
2.2.3. Jenis-jenis Anggaran	13
2.2.4. Karakteristik Anggaran Sektor Publik	15
2.2.5. Anggaran Dalam Sektor Pemerintah	15
2.2.6. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja	16
2.3. Konsep Anggaran Berbasis Kinerja	17
2.4. Tahap-tahap Dalam Penyusunan Anggaran	18
2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
2.5.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
2.5.2. Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
2.5.3. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	24
2.5.4. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	24
2.6. Evaluasi Anggaran	28
2.6.1. Pengukuran kinerja sektor publik	28
2.6.1.1. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik	28



2.6.1.2. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja	30
2.6.1.3. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja	31
2.6.2 <i>Value For Money</i>	32
2.6.2.1 Konsep Umum <i>Value For Money</i>	32
2.6.2.2 Manfaat <i>Value for Money</i>	33
2.6.2.3 Pengukuran <i>Value for Money</i>	33
2.6.2.4 Substansi Ekonomis, Efisiensi, dan Efektifitas	34
2.6.2.5 Langkah-langkah Pengukuran <i>Value For Money</i>	34

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

3.1 Keadaan Umum Wilayah	36
3.1.1 Sejarah Umum Wilayah	36
3.1.2 Kondisi Geografis	37
3.1.3 Perekonomian Kota Bandar Lampung	39
3.2 Kondisi Sosial Budaya	40
3.2.1 Kependudukan	40
3.2.2 Pendidikan	41
3.2.3 Keagamaan	42
3.3 Visi dan Misi Kota Bandar Lampung	43
3.3.1 Visi Kota Bandar Lampung	43
3.3.2 Misi Kota Bandar Lampung	44
3.3.3 Rencana Strategis	45
3.4 Struktur Organisasi	45
3.5 Proses Penyusunan APBD Kota Bandar Lampung	49
3.6 APBD Kota Bandar Lampung	50
3.6.1 APBD Kota Bandar Lampung tahun 2007	50
3.6.2 APBD Kota Bandar Lampung tahun 2008	52
3.6.3 APBD Kota Bandar Lampung tahun 2009	54

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	56
4.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung	56
4.1.1.1 Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung	56
4.1.1.2 Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung	59
4.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Bandar Lampung	63
4.1.3 Program Pemerintah Kota Bandar Lampung	67
4.1.4 Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung	74
4.1.5 Kebijakan Umum APBD Kota Bandar Lampung	76
4.1.6 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	79
4.1.7 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	80
4.1.8 Rancangan Peraturan Daerah APBD	81
4.1.9 Pelaksanaan APBD	81
4.1.10 Pertanggungjawaban APBD	82
4.2 Pengukuran Anggaran Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i>	83
4.2.1 Pengukuran <i>Value For Money</i> untuk tahun anggaran 2007	83
4.2.2 Pengukuran <i>Value for Money</i> untuk tahun anggaran 2008	88
4.2.3 Pengukuran <i>Value for Money</i> Untuk Tahun Anggaran 2009	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan..... 95
5.2 Saran..... 96
DAFTAR PUSTAKA..... 97

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2008.....	40
Tabel 3.2	Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2008	41
Tabel 4.2.1	Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007.....	83
Tabel 4.2.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008.....	88
Tabel 4.2.3	Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penyusunan KUA dan PPA..... 26

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta untuk mengetahui efisiensi, efektifitas, dan ekonomis anggaran periode 2007, 2008, dan 2009 dengan menggunakan konsep Value For Money.

Dari proses pembahasan didapati bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja tetapi belum utuh dan konsisten yang terlihat dari adanya beberapa SKPD yang belum memiliki standar pelayanan minimal yang jelas. Selain itu, masih adanya aparat pemerintah daerah yang belum memahami peraturan-peraturan terkait sehingga dapat mempengaruhi kinerja.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Efisiensi, Efektif dan Ekonomis

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how is Bandar Lampung Government implement Performance Based Budgeting in arranging income budgeting and expense budgeting. Beside that is to know the eficiency, efectivity and economic budgeting in 2007, 2008, and 2009 period by using value for money concept.

By the disscussion process we can see that Bandar Lampung government has not implement the performance based budgeting fully and consistent, it shows by the SKPD which has not have the clear minimal service standard yet. Beside that, there is still government who has not understand about the rules so that can influence the performance.

Key words: Performance Based Budgeting, Eficiency, Efectivity and Economics.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/ TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobby Allay Indo Anggarista
NIM : 01061003052
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Bandar Lampung”**.

Pembimbing

Petua : Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak
Anggota : H. Aspahani, SE, M.M, Ak
Tanggal diuji : 9 Mei 2011

adalah benar- benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Di skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya,

Yang memberi pernyataan



Bobby Allay Indo Anggarista

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma/pandangan masyarakat umumnya membentuk suatu pengertian tertentu di dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat. Paradigma baru di dalam perkembangan masyarakat modern, antara lain, keterbukaan (transparansi), peningkatan efisiensi (efisiensi), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*). Paradigma tersebut merupakan dampak dari perkembangan proses demokrasi dan profesionalisme di dunia. Paradigma ini memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Proses reformasi dan krisis multidimensional (ekonomi, moneter, hukum, politik) di Indonesia turut serta mendorong berkembangnya paradigma tersebut. Paradigma tersebut di Indonesia sering disebut *good governance* yang mendorong adanya reformasi manajemen keuangan daerah.

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya. Prinsip-prinsip dari *good governance* antara lain seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Bambang, 2006).

Paradigma *good governance* tersebut turut serta mendorong adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah sendiri ditandai dengan dikeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Paket undang-undang di bidang Pengelolaan Keuangan Negara tersebut adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Perubahan ini



diikuti juga dengan keluarnya peraturan baru yaitu PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan itu didorong oleh berbagai faktor termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di Indonesia yaitu sistem anggaran tradisional terkesan sangat kaku sehingga dirasakan sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya jika sistem penganggaran tersebut diganti dengan sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut.

Selain itu, Anggaran tradisional juga tidak didasarkan pada konsep value for money yang menekankan konsep ekonomis, efisiensi dan efektifitas yang menjadikan kurangnya pertimbangan yang matang dalam melakukan penyusunan anggaran. Hal ini sering menyebabkan terjadinya kelebihan anggaran yang pengalokasiannya dipaksakan pada aktifitas yang sebenarnya kurang bermanfaat bahkan cenderung tidak perlu untuk dilaksanakan hanya karena alasan untuk menghabiskan sisa lebih anggaran.

Apabila pengalokasian tersebut tidak dilakukan maka berdampak pada alokasi anggaran tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan penilaian kinerja pemerintah daerah hanya didasarkan pada habis atau tidaknya anggaran yang ditetapkan atau hanya atas

ketaatan penggunaan dana yang diajukan dan bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktifitas yang dilakukan, dibandingkan dengan target kinerja yang diinginkan.

Berbagai kelemahan pada pendekatan anggaran tradisional menjadikan pendekatan ini menjadi kurang layak untuk digunakan pada era otonomi daerah seperti saat ini. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas yang untuk mewujudkannya diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola setiap aktivitasnya.

Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan anggaran berbasis kinerja sebagai pengganti dari anggaran tradisional. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggaran berbasis kinerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai.

Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) dan prinsip *good corporate governance* (Bambang, 2006). Agar dapat diketahui apakah pemerintah daerah telah melaksanakan tugasnya secara ekonomis, efektif dan efisien, perlu dilakukan suatu evaluasi yang diharapkan dapat dijadikan masukan yang bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas dari pemerintah daerah itu sendiri pada periode-periode selanjutnya guna mewujudkan apa yang disebut dengan *good corporate governance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja dengan mengambil judul :

“Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Bandar Lampung”.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas penulis sehubungan dengan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung ialah :

- Bagaimanakah penerapan anggaran berbasis kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan anggaran berbasis kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan konsep *value for money*,

1.4. Manfaat Penelitian

Merujuk kepada tujuan penelitian diatas terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, antara lain:

1. Bagi penulis, Sebagai sarana menerapkan teori-teori yang selama ini telah diperoleh guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengevaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja yang telah dilakukan.
3. Sebagai tambahan bahan referensi bagi pihak lain dalam mengevaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah lainnya, sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap kinerja pemerintah kota atau kabupaten dalam hal penyusunan anggaran daerah.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka ruang lingkup penelitian ini hanya difokuskan pada evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Bandar Lampung Jl. Dr. Susilo No. 2, Teluk betung, Bandar Lampung.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis :

1. Penelitian Pustaka

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka adalah dengan menggunakan buku-buku referensi, yang digunakan sebagai acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diambil dan untuk

mempermudah pemahaman atas permasalahan melalui landasan teori yang digunakan.

2. Penelitian Lapangan

Metode ini dilakukan dengan carap terjun langsung ke lapangan guna memperoleh keterangan atau data yang dikehendaki. Pengumpulan data dengan metode ini menggunakan tiga cara, yaitu :

- a. Dokumentasi, dengan melihat dokumen, cetakan dan laporan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai dasar analisis yang akan dilakukan penulis.
- b. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada beberapa orang karyawan yang mewakili Instansi untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditelitidengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.5.4. Jenis Data

Data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data utama yang menunjang sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah dokumen, catatan dan laporan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2. Data Sekunder

Adalah data yang dianggap relevan yang diperoleh dari buku- buku, majalah, artikel-artikel atau sumber-sumber lainnya yang dimiliki oleh

penulis atau Instansi tersebut.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis :

1. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap perhitungan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disusun berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja dengan menggunakan pengukuran *value for money* untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

1. Untuk mengukur tingkat ekonomis digunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{ekonomis} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

2. Untuk mengukur tingkat efisiensi digunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

3. untuk mengukur tingkat efektifitas digunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

2. Analisis Kualitatif

Analisis ini digunakan untuk memperbandingkan antara praktek yang diterapkan dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan penulis. Analisis ini juga digunakan untuk mendukung pembahasan dari hasil analisis kuantitatif.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyajikannya dalam lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan berkenaan dengan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, lokasi, jenis data, dan teknik analisis data.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan berisi teori-teori sebagai landasan dalam pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Bab ini berisikan gambaran umum wilayah Kota Bandar Lampung, serta gambaran umum Pemerintah Kota Bandar Lampung.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjabaran analisis dan pembahasan secara terstruktur mengenai pelaksanaan atas penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung serta menilai apakah dalam penerapannya telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien,.

BAB V KESIMPULAN, dan SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, yang menguraikan kesimpulan dari bab IV ini serta saran-saran yang

sekiranya bermanfaat baik bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung
maupun bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Suprasto, Bambang. 2006. "Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja" Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordiawan, Deddy. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. Undang – Undang Republik Indonesia No. 5/1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang – Undang Republik Indonesia No. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7/2003 Tentang Keuangan Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang - Undang Republik Indonesia No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Republik Indonesia No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Menteri Dalam Negeri. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diakses Tanggal 14 November 2010